

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Departemen Ilmu Pemerintahan



Oleh

SRI RAMDANI

E12116008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN
BARRU KABUPATEN BARRU**


Disusun dan diajukan oleh :

SRI RAMDANI

E 121 16 008

Menyetujui :

Pembimbing,



Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 197705132003021002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin,



H. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Ramdani

NIM : E12116008

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Desember 2020

Yang menyatakan,


Sri Ramdani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT. Atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di Yaumul Qiyamah nanti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak kendala serta tantangan yang harus dihadapi yang membutuhkan waktu tidak singkat. Namun, semua itu penulis dapat menghadapinya berkat doa, kegigihan dan bimbingan dari berbagai pihak atas izin ALLAH SWT.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Murkimin dan Mama Murni yang telah membersarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan penuh yang tak henti-hentinya baik secara moril dan

materil. Semua pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orangtua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan perhatian dalam segala kondisi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada ambo aji Enre dan indo aji Muli dan Ambo Beddu Hati dan Indo Aji Saodah yang telah membersarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan penuh yang tak henti-hentinya baik secara moril maupun moril, semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan umur panjang tetaplah berbahagia salalu.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materil maupun non-materil. Sehingga kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin:
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;

3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh staf pegawai di lingkungan Departemen Ilmu Pemerintahan:
4. Bapak alm. Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama 8 semester menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Rahmatullah, S.IP., M. Si. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai:
6. Kepada para tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan membangun dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si. dan Bapak Dr. H. Suardiman Syamsuh, M. Si.:
7. Seluruh dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Dr. Suhardiman, S.Sos, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Sunardi, S.IP, M.AP, dan kepada Bapak alm Prof. Dr. H A. Gau Kadir, MA, Bapak alm Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si, Bapak alm. A. Murfhi, S.Sos, M.Si, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.

8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, yakni Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru Bapak Ir. Ahmad, MM, Kepada Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bidang Holtikultura Bapak dan Ibu, Kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Barru Bapak Achmad Baso, S.ST, Kepada Bapak dan Ibu Penyuluh se-Kecamatan barru Bapak Muldin, S.Pt, Ibu Suriani, S.ST, Ibu A. Nur Asmawati, S.TP, Artati Latig, SP, Hamisah, SP, Kasmin, S.Pt, Bapak Yasir Harun, SP, Bapak Muhaemin Umar, S.ST, Bapak Ahmad dan Taufiq Sp serta seluruh sataf Kantor Balai Penyuluh Kecamatan Barru, Kepada seluruh Sekretaris Desa/Kelurahan bapak Badaruddin, Bapak Kamaluddin, S.Pd, bapak sekretis Desa Ana'banua dan Kelurahan Sepe'e, Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Palakka Bahtiar, S.Pd, Ketua-Ketua Kelompok Tani Bapak Hasanuddin S.Pd, Kasman, Bapak Idrus serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi kepada penulis:
9. Terimakasih kepada kakak, orangtua, teman Bapak Hamzah, S.Pd yang senantiasa selalu memberikan masukan dan kritikan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi, terimakasih atas bantuannya
10. Kepada keluarga besar penulis, Ambo H. Enre dan Beddu Hati, Indo H. Muli dan H. Saodah, beserta Om-om, tante-tante, dan semua keluarga tanpa terkecuali terimakasih dukungan dan doanya.

11. Terimakasih kepada saudara kandung Penulis, Milda Murkimin dan Akram Murkimin serta adik-adikku semua Nurtajang Asikin, Aslin Asikin, Yunita Asikin yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini. Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus teman terbaik.
12. Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan sejak menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin, Saudara-saudaraku angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di FISIP UNHAS, selalu memberikan semangat dan bantuan dalam saat-saat sulit.
13. Terimakasih untuk sahabat-sahabtku Wanita Solehah semoga tetap Solehah, Uun, Ayulia dan Mitha. Terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan yang ternyaman. Semoga bisa tetap akrab walaupun nantinya tidak selalu berjumpa.
14. Terimakasih untuk sahabat-sahabtku Rilirili Squad, Ismail, Valen, Oma, Imran, Hesti, Heril dan Chika. Terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan yang gokil dan heboh. Semoga bisa tetap akrab walaupun nantinya tidak selalu berjumpa.
15. Terimakasih untuk Saudara dan saudari tercinta Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas angkatan 2016 Veren16en, teruntuk seperjuangan kepengurusan Dirvan, Barsan, Cica, Ayu, Niaw, Hesti, Wanda, Uni, Romi, Wawan, Dede, Heril, Ari, Ferry, Yusrisal, Wahid, Agung, terimakasih untuk pergulatan yang penuh cinta di Bumi Orange.

Teruntuk Fira dan Oma terimakasih telah menguji kesabaran. Terimakasih untuk semua cinta dan peluk dikala Hujan dibulan September. Sampai bertemu kembali di pelaminan, rantauan, tongkrongan atau ketidak sengajaan takdir Tuhan:

16. Terimakasih untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga, semangat dan kekeluargaan yang hangat. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.
17. Terimakasih untuk teman-temanku dari kecil SD Inpres Camming Fika, Via, Mila, Dewi, Niar, Riska, Evytamala, Umi, Lisa, Eka, Erni, Jasma, Evelyana, Imran, Irwan, Ansar, Artin, Syahrul Terimakasih sudah menjadi sahabat dari kecil semoga persahabatan kita bisa terjalin sampai selamanya.
18. Terimakasih untuk teman-temanku SMP Negeri 3 Barru terutama IX asikasik yang selalu asik bila ketemu
19. Terimakasih untuk teman-temanku SMA Negeri 1 Barru terutama Gezod Ismail Said, Ayu Rustan, Ughe, Andi Diah, Asih, Yulianti, Herianti, Nunu, Asrah, Chya, Fahdal, Alfian, Riski Supu, Reski Amelia, Resky Amalia, Waldi, UlilAsmi, Zainal, Aswin, Irwin, Yusril, Putri Ayu, Alma Rapus, Wiwi, Arima, Yunita, Sari, Khusnul, evy, Aan, Alex dan Riska see u guys.
20. Teman-teman The Magerst KKN Bantaeng Gel.102 Desa Mappilawing, kak Anca, Kak Jhon, Kak Zakaribo, Mario, rianshasoo, Fairuz, Mita, Dian Yahya, Dian Adel, Salwa, Murdi terimakasih telah menjadi satu bagian

dalam memoriku beserta bapak posko Baharuddin, dan ibu Suaebah, adek Faqihku, Bapak Asri Kepala desa mappilawing Kecamatan Eremmerasa Kabupaten Bantaeng, seluruh kepala dusun dan seluruh masyarakat Desa Mappilawing Banteang.

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Terima Kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
INTISARI.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	15
1.3 TUJUAN PENELITIAN	16
1.4 MANFAAT PENELITIAN	16
a. Manfaat Teoritis	16
b. Manfaat Praktis	17
c. Manfaat Metodologis.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Peran.....	19

2.2. Pemerintah Daerah	22
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	22
2.2.2 Pemerintah Daerah	25
2.3. Pemberdayaan Masyarakat Tani.....	29
2.4 KERANGKA PIKIR	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3 Informan Penelitian	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Jenis Data Penelitian	43
3.6 Fokus Penelitian.....	43
3.7 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Kabupaten Barru.....	47
4.1.1.1 Masa Kerajaan dan kedudukan Belanda.....	47
4.1.1.2 Masa Awal Kemerdekaan Indonesia.....	48
4.1.1.3 Kelahiran Kabupaten Barru	49
4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Barru	49

4.1.3 Keadaan Demografis Kabupaten Barru	52
4.1.4 Gambaran Lokasi Penelitian	57
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Barru	58
4.1.6 Sejarah Singkat Dinas Pertanian Kabupaten Barru	59
4.1.7 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Barru.....	60
4.1.8 Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Barru	63
4.1.9 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	65
4.1.8.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	65
4.2.0 Gambaran Kantor Pelaksana Penyuluhan	73
4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, serta Penguatan Kelembagaan.....	78
4.2.1 pendidikan dan Pelatihan	78
4.2.2 Penyuluhan dan Pendampingan.....	93
4.2.3 Penguatan Kelembagaan	105
4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru	115
4.3.1 Faktor Penghambat.....	116

4.3.1.1 Hambatan	116
4.3.1.2 Hambatan Jumlah Penyuluh Terbatas	117
4.3.2 Faktor Pendorong	121
4.3.2.1 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	121
4.3.2.2 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	122
BAB V PENUTUP.....	125
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produksi Pertanian Kabupaten Barru.....	8
Tabel 2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.....	35
Tabel 3.	Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru	50
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	51
Tabel 5.	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	52
Tabel 6.	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Umur	52
Tabel 7.	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan perkawinan	53
Tabel 8.	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan perkawinan....	54
Tabel 9.	Persentase Penduduk yang memiliki NIK	55
Tabel 10.	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Perangkat daerah.....	60
Tabel 11.	Data Kelas Kemampuan Kelompok	75
Tabel 12.	Balai Penyuluh Pertanian.....	76
Tabel 13.	Jenis Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan	82
Tabel 14.	Program, Kegiatan Balai Penyuluh Pertanian	90
Tabel 15.	Jenis Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan.....	94
Tabel 16.	Data Kelembagaan Tani BP3K Kecamatan Barru	110

Tabel 17. Data Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Tani	112
Tabel 18. Daftar Nama-nama Penyuluh Pertanian	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir.....	38
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	63

INTISARI

Sri Ramdani, E12116008. Program studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”. Dibawah bimbingan oleh Rahmatullah, S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dan penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru serta faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu sesuai penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di kecamatan barru, dengan teknik mengumpulkan data meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder meliputi dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta melibatkan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan modal, bantuan bibit, pupuk dan asuransi padi. Kelompok tani dibangun dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan dilingkungan masyarakat setempat dan penguatan kelembagaan dengan menjalin hubungan harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada lembaga masyarakat di Kecamatan Barru. Kedua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dukungan kebijakan pemerintah daerah, dukungan permodalan dari berbagai lembaga keuangan. Adapun yang menjadi penghambat yakni pendidikan petani yang masih rendah dan keterbatasan penyuluh

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Petani

ABSTRACT

Sri Ramdani, E12116008. The Governmental Science study program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "The Role of Local Government in Empowering Farmers in Barru District, Barru Regency". Supervised by Rahmatullah, S.IP., M.Si. As a Guide.

This study aims to determine the role of local governments in the implementation of education and training, counseling and mentoring and institutional strengthening of farmers in Barru District, Barru Regency and the factors that influence the role of local government in empowering farmers in Barru District, Barru Regency.

The method used in this research is to use a descriptive type of research with a qualitative approach, which is according to research that aims to describe, describe and intend to explain the role of local government in empowering farmers in the Barru sub-district, with data collection techniques including primary data, namely observation and interviews and secondary data includes documents, records, reports, and official archives, and literature.

The results showed that the role of local government in empowerment was carried out by providing socialization, counseling and participatory community involvement, business development by providing capital, seed assistance, fertilizer and rice insurance. Farmer groups are built with a spirit of mutual cooperation and instill religious values in the local community and strengthen institutions by establishing harmonious relationships, providing direction and support to community institutions in Barru District. The two factors that influence farmer empowerment in Barru District, Barru Regency include supporting and inhibiting factors. Supporting factors for local government policy support, capital support from various financial institutions. As for the obstacles, namely the low education of farmers and the limitations of extension workers

Keywords: Role of Local Government, Empowerment of Farmers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka sumbangsi yang berpotensi besar dalam pembangunan Nasional adalah bidang pertanian, ditunjukkan oleh sebagian besar pendapatan mereka berasal dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil.

Sektor Pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Pertanian tanaman pangan, memankan peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan asupan gizi masyarakat.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang pembangunan ekonominya masih bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada besarnya kontribusi sektor tersebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang mencapai sekitar 4,52 persen pada tahun 2019¹

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala daerah sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan desa baik pembangunan masyarakat maupun pembangunan perekonomian daerah.

Sektor pertanian, selain besar peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi, juga memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan jumlah penduduk kabupaten barru sebagian besar bekerja dan mencari nafkah disektor pertanian atau yang erat kaitannya dengan sektor tersebut. Hal ini akan sangat membantu penduduk yang bekerja disektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka dengan

¹ Statistik Pertanian dan Alat-Alat Petanian Kabupaten Barru

ditunjang oleh produksi pertanian yang berkualitas dan semakin meningkat.

Hasil-hasil sektor pertanian di daerah ini selain dikonsumsi dalam daerah sendiri, juga dijual ke daerah lain. Prospek permintaan hasil-hasil sektor pertanian cukup baik. Karena itu upaya untuk meningkatkan produksi hasil-hasil sektor ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan penerapan kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan daerah di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten barru pada bagian ke-10 (sepuluh) dinyatakan bahwa Dinas pertanian memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutuskan kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan

mesin pendukung pertanian. Selain itu, dinas pertanian juga adalah penjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani padi (AUTP)². Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya, dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan daerah, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah daerah tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala daerah sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan membina pemberdayaan masyarakat khususnya petani.

Pemberdayaan berarti usaha (program proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna

² Peraturan daerah kabupaten barru nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten barru

mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani³.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja kantor pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha; melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan melakukan

³ Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.

Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kecamatan Barru terletak di daerah wilayah Kabupaten Barru dengan luas wilayah $\pm 199,32 \text{ KM}^2$. Kecamatan Barru terdiri dari 5 Desa 5 Kelurahan, Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Balusu kabupaten Barru, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tanete riaja kabupaten Barru, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Soppeng dan kabupaten Bone, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Penduduk Kecamatan barru terdiri dari 41.452 jiwa yang tersebar disetiap Desa dan Kelurahan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi sedangkan dari penyelenggaraan penyuluhan terkendala oleh masih kurangnya kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun metode penyuluhan⁴.

Kabupaten Barru memiliki kekuatan perekonomian pada sektor pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barru berupa lahan pertanian dan sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB. Sektor

⁴ RPJMD Dinas Pertanian Kabupaten Barru

pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan pangan, penganekaragaman menu makanan, dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Produksi Pertanian Kabupaten Barru

Nama		Nilai			Satuan
		2017	2018	2019	
1. Tanaman pangan					
1. Luas Lahan Pertanian					
1. Lahan Sawah					
1. Beririgasi			5.611	5.611	Ha
	1) Tanete Riaja	904	904	904	Ha
	2) Tanete Rilau	0	0	0	Ha
	3) Barru	1631	1.631	1.631	Ha
	4) Soppeng Riaja	1065	1.065	1.065	Ha
	5) Mallusetasi	811	811	811	Ha
	6) Pujananting	1200	1.200	1.200	Ha
	7) Balusu	0	0	0	Ha
2. Tadah Hujan			9.859	9.859	Ha
	1) Tanete Riaja	1500	1.779	1.779	Ha
	2) Tanete Rilau	1947	1.947	1.947	Ha
	3) Barru	1360	1.360	1.360	Ha

			4)Soppeng Riaja	543	469	469	Ha
			5)Mallusetasi	931	931	931	Ha
			6)Pujanantin g	1027	1.626	1.626	Ha
			7)Balusu	1747	1.747	1.747	Ha
			2.Lahan Kering		8.197	8.197	Ha
			1.Tegal/Kebun		5.546	5.546	Ha
			1)Tanete Riaja	1077	1.077	1.077	Ha
			2)Tanete Rilau	555	555	555	Ha
			3)Barru	1297	1.297	1.297	Ha
			4)Soppeng Riaja	502	502	502	Ha
			5)Mallusetasi	640	811	811	Ha
			6)Pujanantin g	477	477	477	Ha
			7)Balusu	827	827	827	Ha
			2.Ladang/Hum a		2.651	2.651	Ha
			1)Tanete Riaja	650	371	371	Ha
			2)Tanete Rilau	270	270	270	Ha
			3)Barru	0	0	0	Ha
			4)Soppeng Riaja	0	0	0	Ha

		5)Mallusetasi	512	931	931	Ha
		6)Pujananting	718	718	718	Ha
		7)Balusu	361	361	361	Ha
		2.Jumlah Produksi Tanaman Pangan		145.640	146.240	
		1.Jumlah Produksi Padi		121.470	124.399	Ton
		1)Tanete Riaja	18322.68	19.835	21.030,22	Ton
		2)Tanete Rilau	14002.2	15.414	14.975,46	Ton
		3)Barau	30546.34	31.040	31.370,28	Ton
		4)Soppeng Riaja	12893.14	12.647	12.000,15	Ton
		5)Mallusetasi	12983.75	12.358	12.975,58	Ton
		6)Pujananting	14565.98	15.408	17.135,38	Ton
		7)Balusu	13560.22	14.768	14.911,97	Ton
		2.Jumlah Produksi Jagung		6.430	5.220	Ton
		1)Tanete Riaja	602,7	1.342	1.359,25	Ton
		2)Tanete Rilau	1204,71	903	1.725,20	Ton
		3)Barau	265,66	457	277,26	Ton
		4)Soppeng Riaja	186,55	363	326,34	Ton
		5)Mallusetasi	335,25	1.151	608,38	Ton
		6)Pujananting	546,97	2.177	910,14	Ton
		7)Balusu	30,08	37	13,67	Ton
		3.Jumlah Produksi Kedelai		0	0	Ton

		1)Tanete Riaja	0	0	0	Ton
		2)Tanete Rilau	16,43	0	0	Ton
		3)Barru	0	0	0	Ton
		4)Soppeng Riaja	0	0	0	Ton
		5)Mallusetasi	0	0	0	Ton
		6)Pujananting	0	0	0	Ton
		7)Balusu	0	0	0	Ton
		4.Jumlah Produksi Ubi		14.054	13.547	Ton
		1)Tanete Riaja	1981,34	2.326	2.236,44	Ton
		2)Tanete Rilau	7952,19	11.196	11.090,52	Ton
		3)Barru	187,63	246	150,71	Ton
		4)Soppeng Riaja	212,55	166	69,14	Ton
		5)Mallusetasi	0	0	0	Ton
		6)Pujananting	154,6	120	0	Ton
		7)Balusu	0	0	0	Ton
		5.Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya		3.687	3.074	Ton
		1)Tanete Riaja	980,38	493	576,21	Ton
		2)Tanete Rilau	24,17	111	45,09	Ton
		3)Barru	376,9	507	546,33	Ton
		4)Soppeng Riaja	74,47	137	96,83	Ton
		5)Mallusetasi	311,43	396	562,06	Ton
		6)Pujananting	1019,52	2.030	1.244,75	Ton

		7)Balusu	11,7	12	2,83	Ton
		3.Nilai Produksi Tanaman Pangan				Ton
		1.Nilai Produksi Padi		375.385.690. 750	634.435.104. 000	Rp
		1)Tanete Riaja	57.075.148. 200	61.829.448.100	107.254.122. 000	Rp
		2)Tanete Rilau	43616853000	48.023.768.100	76.374.846.000	Rp
		3)Barru	95151849100	94.217.940.950	159.988.428. 000	Rp
		4)Soppeng Riaja	40162131100	39.394.470. 500	61.200.765.000	Rp
		5)Mallusetasi	40.444.381. 250	38.128.814. 850	66.175.458. 000	Rp
		6)Pujananting	4.537.3027. 700	47.789.052. 850	87.390.438. 000	Rp
		7)Balusu	42.240.085.300	46.002.195. 400	76.051.047. 000	Rp
		2. Nilai Produksi Jagung		12.463.311. 000	21.402.984. 000	Rp
		1)Tanete Riaja	1.265.670.000	2.970.114.000	5.572.925.000	Rp
		2)Tanete Rilau	1.529.891.000	1.296.771.000	7.073.320.000	Rp
		3)Barru	557886000	785.190.000	1.136.766.000	Rp
		4)Soppeng Riaja	391.755.000	762.573.000	1.337.994.000	Rp
		5)Mallusetasi	704.025.000	2.241.351.00 0	2.494.358.000	Rp
		6)Pujananting	1.148.837. 000	4.288.158.00 0	3.731.574.000	Rp
		7)Balusu	63.168.000	119.154.000	56.047.000	Rp
		3. Nilai Produksi Kedelai		0	0	Rp
		1)Tanete Riaja	0	0	0	Rp
		2)Tanete Rilau	80.507.000	0	0	Rp
		3)Barru	0	0	0	Rp

		4)Soppeng Riaja	0	0	0	Rp
		5)Mallusetasi	0	0	0	Rp
		6)Pujananting	0	0	0	Rp
		7)Balusu	0	0	0	Rp
		4. Nilai Produksi Ubi		7.276.799.250	71.798.093.000	Rp
		1)Tanete Riaja	1.040.203.500	1.194.705.750	11.853.132.000	Rp
		2)Tanete Rilau	4.174.899.750	5.808.096.000	58.779.756.000	Rp
		3)Barru	98.505.750	124.120.500	798.763.000	Rp
		4)Soppeng Riaja	111.588.750	87.144.750	366.442.000	Rp
		5)Mallusetasi	0	0	0	Rp
		6)Pujananting	81.165.000	62.732.250	0	Rp
		7)Balusu	0	0	0	Rp
		5.Nilai Produksi Tanaman lainnya		33.548.333.000	15.370.500.000	Rp
		1)Tanete Riaja	8.921.458.000	4.486.482.000	2.881.050.000	Rp
		2)Tanete Rilau	219.947.000	1.010.646.000	225.450.000	Rp
		3)Barru	3.429.790.000	4.616.976.000	2.731.650.000	Rp
		4)Soppeng Riaja	677.677.000	1.246.063.000	484.150.000	Rp
		5)Mallusetasi	2.834.013.000	3.607.331.000	2.810.300.000	Rp
		6)Pujananting	9.277.632.000	18.474.183.000	6.223.750.000	Rp
		7)Balusu	106.470.000	106.652.000	14.150.000	Rp

Kecamatan Barru sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian, kemudian mata pencaharian masyarakat sebagian besarnya adalah petani, akan tetapi walaupun demikian sektor

pertanian di Kecamatan Barru tidak luput dari berbagai tantangan dalam pertanian yang paling nyata dihadapi adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif dipedesaan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, memperkuat kemampuan untuk bersaing dipasar global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi muda⁵.

Berdasarkan hasil wawancara awal kepada masyarakat petani yakni kepala dusun camming menuturkan bahwa “Permasalahannya, dalam pengelolaannya baik dalam hal pengolahan lahan, proses produksi belum berjalan secara maksimal serta ketidak mampuan petani ialah petani sering membutuhkan (Alat produksi dan pengolahan pertanian) tapi harga tinggi dan barang tidak ada dan dalam hal penyuluhan dan pendampingan petani yang dilakukan tidak ada pendampingan secara berkelanjutan”. Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pemberdayaan petani yang dilakukan belum seutuhnya menyentuh

⁵ Ibid

seluruh masyarakat tani, belum efisiennya manajemen penyuluhan, belum lengkap/masih lemahnya struktur dan kelembagaan penyuluhan ditingkat lapang, yang pada umumnya penyuluhan dipandang hanya sebagai proses transfer teknologi, bukan sebagai proses peningkatan kemampuan, dan keberadaan pelaku utama dan pelaku usaha serta peningkatan pendapatan masyarakat, kurangnya penggunaan metode penyuluhan yang efektif dan efisien.

Mengamati kondisi Kecamatan Barru, Kabupaten Barru seperti yang jelaskan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan mengangkat judul penelitian yakni **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”**

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan dilatar belakang maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru ?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah diatas. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi akademis/teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan peranan kepala daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kemampuan

berpikir secara ilmiah dan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakan Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.

2. Dari segi praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan petani. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat tani terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Dari segi metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi pembaca yang berhubungan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan petani. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian yang telah di peroleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan peran Pemerintah terutama Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.⁶

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, kontruksi, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.

Secara umum teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk

⁶ repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf? (diakses 07 Februari 2020)

menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih⁷.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Peran

Dalam kehidupan setiap manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan peran dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda yang dipengaruhi dari latar belakang sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁸

Peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial

⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Prenada Media, Jakarta : 2005. Hlm.34

⁸ <https://www.kbbi.web.id/peran>, pada 07 Februari 2020, pukul 14.30

khusus. Didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.

Sedangkan menurut Soejorno Soekanto peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Lebih lanjut ia mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hal 212-213

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut¹⁰.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah

¹⁰ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta : 2002. Hlm.268-269

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang¹¹.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah¹².

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 07 Juni 2020, pukul 17.31 wita.

¹² The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah¹³.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan¹⁴.

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹³ Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah,, Bandung : Sinar Baru hlm 87.

¹⁴ Rianto Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Jakarta, Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 90.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.2.2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut **Gubernur**, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan **Bupati**, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut **Walikota**. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil

kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan Kepala Daerah :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas :

1. Membantu kepala daerah dalam
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Tani

Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya¹⁵.

Berbeda dengan pendapat Pranarka sumodiningrat menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” dari pada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa

¹⁵ A.T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Jogjakarta : 2004. Hlm.77

yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya¹⁶.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian¹⁷.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

¹⁶ Tri Winarni, Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta : 1998. 75-76

¹⁷ Ibid. Hlm.75

(1) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.

(2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri¹⁸.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka¹⁹. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

¹⁸ Ibid., Hlm.76

¹⁹ Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan, Aditya Media, Yogyakarta : 2003. Hlm.43 .

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek²⁰.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi²¹.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (wikipedia-indonesia). Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Priyono (1996) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang

²⁰ Ibid., Hlm. 44

²¹ Sulistiyani, op.cit., Hlm.82

adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, men-swadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. *Empowerment* atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok

masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*).

Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna meng-upayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Penambahan nilai ini dapat mencakup pada ruang bidang aspek sosial, ekonomi, kese-hatan, politik dan budaya.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses tumbuhnya kekuasaan serta kemampuan baik individu maupun kelompok masyarakat yang masih miskin, terpinggirkan dan belum berdaya. Melalui proses pemberdayaan diharapkan kelompok masyarakat masyarakat bawah dapat terangkat menjadi kelompok manusia yang menengah dan atas. Hal tersebut dapat terjadi bila mereka diberikan kesempatan serta fasilitas dan bantuan dari pihak yang terkait. Kelompok masyarakat miskin di pedesaan sulit untuk melakukan proses pemberdayaan tanpa adanya bantuan dan fasilitas.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- (1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian²².

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan maju Tahun 2020 Kabupaten Barru

No	Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu	Sumber dana	Prakiraa n Maju
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Indikatif		
	Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Barru	Jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani (11 orang)		60.6 18.0 00	APBD	102.287. 250

²² Ibid., Hlm.83

	Program pembinaan dan Produksi Pertanian	Barru	Jumlah Produksi tanaman hortikultura (15.060 Ton)		373. 272. 000		321.395. 400
	Program penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Barru	Cakupan penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (220 KK)		697. 795. 000	APBD	130.000. 000
	Program peningkatan kesejahteraan Petani	Barru	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis (40 kelompok)		325. 568. 000	APBD	200.755. 000
	Program peningkatan ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Barru	Jumlah produksi tanaman pagi/pangan (129.391 Ton/137.948 Ton)		3.31 8.70 5.06 7	APBD	2.755.00 0.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Barru	Penanganan pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil 100%		90.7 42.0 00	APBD	169.396. 000.000

Sumber ; Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021

2.4. Kerangka Pikir

Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan petani di kecamatan barru kabupaten barru sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang

desa pasal 26 ayat (1) serta peraturan daerah kabupaten barru nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten barru bagian 10 (sepuluh).

Peran tersebut sangat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat petani dimana pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dan penguatan kelembagaan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Pemberdayaan petani dilakukan antara lain agar petani dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

Bagan 1. Kerangka Pikir

